

**POLITIK LUAR NEGERI GUS DUR
DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS
GERAKAN ACEH MERDEKA**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH :
ZULLIO ANDAWIGUNA SUTRISNO**

2001 051 0168

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**POLITIK LUAR NEGERI GUS DUR DALAM UPAYA
MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA**

Yang Disusun Oleh :



Nama : Zullio Andawiguna Sutrisno

NIM : 2001 051 0168

Telah Dipertahankan dalam Ujian Pendadaran dan Dinyatakan Lulus di Depan Tim
Penguji Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 7 Oktober 2005

Jam : 10.00

Tempat : Ruang Ujian HI-A

TIM PENGUJI

Ketua Penguji

Drs. Djumadi M. Anwar M.Si

Penguji I

Penguji II



A handwritten signature in black ink, written over the name of the second examiner.

**Banyak hal yang ingin diubah setiap orang di masa lalu
agar hidup tidak seperti yang dijalannya sekarang
atau seperti yang kita tahu akan kita hadapi nanti**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "*Politik Luar Negeri Gus Dur dalam Upaya Menyelesaikan Kasus Gerakan Aceh Merdeka*" ini. Karya tulis ini disusun dalam rentang waktu sekitar tujuh bulan, dimulai sejak pertengahan Februari dan selesai pada akhir September 2005. Sungguh merupakan suatu upaya yang cukup memakan waktu dan tenaga.

Penulis tidak segan menyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu penulis tetap mengharapkan sikap kritis rekan-rekan terhadap karya tulis ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih tak terbilang kepada semua teman-teman yang telah memberi bantuan dan dorongan semangatnya. Nama dan kebaikan kalian tak bisa aku sebutkan satu persatu disini.

B U T T . . . U N O W H O U R . . .

Terima kasih juga penulis haturkan kepada para dosen pembimbing yang telah memberi berbagai masukan dan kritik yang amat membantu penyempurnaan skripsi ini :

1. Yang terhormat, Dra. Djuwadi, M. Anwar, M.Si selaku dosen

2. yang terhormat Sugeng Riyanto S.IP. M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UMY, selaku dosen pembimbing dan penguji kedua.
3. yang terhormat Drs. Bambang Sunaryono M.Si selaku dosen pembimbing dan penguji ketiga.

Last, *a very special thanx buat pi n mi*, karena sudah menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anaknya.

Akhir kata, besar harapan penulis bila akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap kalangan yang tengah memperkaya literatur dan wawasannya seputar studi politik luar negeri Indonesia, yang berkaitan dengan masalah diplomasi, pertahanan dan keamanan nasional, dan disintegrasi negara. Segala kekurangan dan kesalahan adalah kekhilafan penulis. Namun segala kebaikan dan manfaat dari skripsi ini merupakan berkah dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Oktober 2005



Zullio Andawiguna

ABSTRAKSI

Pada tahun 1970-an pemerintahan Suharto mulai mengelola hasil bumi Aceh seiring ditemukannya gas alam, yang menurut beberapa pihak merupakan yang terbesar di dunia saat itu. Namun pembangunan industri tersebut kedepannya ternyata tidak kunjung membawa kebaikan bagi perekonomian Aceh. Dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak merekrut pemuda-pemuda Aceh, namun lebih banyak mendatangkan orang-orang dari luar. Sebagian besar masyarakat Aceh masih berada dalam garis kemiskinan. Bahkan kultur Islami Aceh mulai meluntur akibat maraknya tempat hiburan, mabuk-mabukan, dan prostitusi dalam skala tak biasa. Puncak kekecewaan dan rasa ketidakadilan ini membuat para mantan pejuang Gerakan Darul Islam dulu berkumpul kembali. Gerakan Aceh Merdeka akhirnya diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976.

Pemerintahan Suharto berupaya menumpas GAM dengan kekuatan militernya. Upaya ini cukup efektif dengan ditandai oleh kaburnya beberapa pimpinan dan anggota GAM ke luar negeri pada akhir 1970-an. Namun di akhir 1980-an ratusan milisi GAM mengobarkan perlawanan kembali terhadap NKRI. Di masa inilah akhirnya status DOM diberlakukan bagi Aceh. Sejak DOM diberlakukan hingga dicabut tahun 1998, ribuan nyawa telah melayang. Puluhan ribu lainnya dipenjarakan, atau disiksa di kamp-kamp militer, atau menjadi korban pelecehan. Pada masa reformasi, atas tuntutan masyarakat Aceh, Pemerintahan Habibie mencabut status DOM. Namun dengan alasan instabilitas keamanan yang terjadi akibat masuknya milisi-milisi GAM dari luar negeri dan disertai meningkatnya aktivitas GAM, pemerintah mengirimkan kembali kekuatan militernya ke Aceh.

Pada masa Gus Dur, pemerintah berupaya melakukan pendekatan secara dialog terhadap GAM. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan tersebut. Pertama, mencuatnya tuntutan referendum rakyat Aceh. Kedua, meningkatnya kekuatan GAM akibat dukungan sebagian rakyat Aceh yang menuntut kemerdekaan. Ketiga, keberlanjutan konflik yang terus menghancurkan perekonomian rakyat Aceh. Keempat, operasi militer yang terbukti tidak efektif pada masa Suharto dan Habibie. Terakhir, kecaman dari berbagai INGO terhadap militer atas pelanggaran HAM yang dilakukannya, dan tawaran HDC dan Malaysia untuk menjadi penengah dialog. Pada 27 Januari untuk pertama kalinya pemerintah dan GAM bertemu dengan dimediasi oleh HDC. Selanjutnya upaya-upaya dialog terus dilakukan di dalam dan luar negeri demi menyelesaikan konflik. Akhirnya pada 12 Mei 2000 pemerintah dan GAM menandatangani *Kesepakatan Bersama atas Jeda Kemamusiaan untuk Aceh*.

Namun sayangnya kesuksesan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara RI dan GAM bertolakbelakang pada kondisi di lapangan. Begitu pula pada perundingan-perundingan berikutnya yang tidak menghasilkan perdamaian yang diharapkan. Kedua pihak tidak dapat mempertahankan komitmen terhadap hasil-hasil perundingan. Memang di satu sisi, Aceh masih tetap menjadi bagian NKRI, dan dukungan dari berbagai negara atas integritas Indonesia berhasil diperoleh Gus Dur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Tujuan Penelitian	2
C. Latar Belakang Permasalahan	3
D. Pokok Permasalahan	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Hipotesis	14
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Jangkauan Penulisan	14
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II GERAKAN ACEH MERDEKA	16
A. Sejarah Lahirnya GAM	16
1. Gerakan Darul Islam	17
2. Republik Islam Aceh	20
.....	??

B. Susunan Kabinet GAM	27
C. Aktivitas, Kekuatan, dan Jaringan Internasional GAM	30
1. Pusat Pemerintahan GAM di Swedia	30
2. Pelatihan Militer di Libya	31
3. Perpecahan di Tubuh GAM	32
4. Hubungan GAM dengan Organisasi Lain	36
5. Upaya-upaya Propaganda	39
BAB III KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PRA GUS DUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GAM	41
A. Era Kepemimpinan Suharto	42
1. Pemberlakuan Status DOM	44
2. Dampak dan Efektivitas Kebijakan Suharto	45
B. Era Kepemimpinan Habibie	51
1. Operasi Wibawa 99	53
2. Operasi Sadar Rencong	54
3. Dampak dan Efektivitas Kebijakan Habibie	54
BAB IV POLITIK LUAR NEGERI GUS DUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GAM	56
A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Gus Dur Melakukan Perundingan dengan GAM	56
1. Kondisi Politik Dalam Negeri	56
a. Mencuatnya Tuntutan Referendum	58
b. Meningkatnya Dukungan Rakyat Aceh terhadap GAM ...	61

3. Pengaruh dari Aktor-Aktor Internasional	67
a. Kecaman Terhadap Militer	67
b. Ajakan untuk Melakukan Dialog	70
4. Visi Gus Dur dalam Mengambil Keputusan	72
B. Kebijakan Gus Dur terhadap GAM	75
1. Upaya Diplomasi Gus Dur terhadap Negara-Negara lain	77
2. Upaya Dialog Pemerintah terhadap GAM	79
3. Dampak dan Efektivitas Kebijakan Gus Dur	87
BAB V KESIMPULAN	89
DAFTAR PUSTAKA	92
TAMPIRAN	94